

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Pajak yang Lesu Jadi Sorotan dalam Rapat Anggaran

**JAKARTA, KOMPAS** — Lesunya memasukan sejumlah pajak daerah DKI Jakarta tahun 2019 menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta hari kedua, Selasa (26/11/2019). Sorotan atas pajak menguat karena pemasukan DKI Jakarta diprediksi turun dari proyeksi semula.

Dari data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, realisasi pajak hingga kemarin sebesar Rp 35,3 triliun atau 91,06 persen dari target pajak daerah Rp 44,5 triliun. Jumlah ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan pajak pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 33,5 triliun.

Namun, sejumlah pajak dinilai lesu. Pemasukan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp 4,83 triliun turun dari perolehan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,84 triliun. Adapun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan kategori dengan realisasi terendah, yaitu baru masuk 43,36 persen dari target tahun ini Rp 9,5 triliun.

Target pajak hiburan tahun 2019 sebesar Rp 850 miliar justru diturunkan dari target tahun lalu Rp 900 miliar. "Perolehan dan target pajak seharusnya naik dari tahun ke tahun. Kenapa sekarang seperti tidak ada peningkatan," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan,

secara umum pendapatan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2019 meningkat dari tahun 2018. Hanya saja, ada beberapa pajak yang(trimbas tren ekonomi saat ini.

Salah satunya pajak BPHTB yang terendah realisasinya karena lesunya penjualan properti di DKI Jakarta. "Menurut para notaris, memang tren penjualan properti di DKI tahun ini turun," katanya.

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Safruddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi sekarang turun menjadi 5,6 persen dari kondisi semula 6,5 persen. Asumsi tren ekonomi yang turun turut menurunkan target pendapatan.

Untuk hotel, berdasarkan data statistik, okupansi di Jakarta turun 5 persen. Demikian juga hiburan diasumsikan mengalami penurunan tren karena beberapa acara besar di Jakarta dipindahkan ke kota lain, seperti Bali, Tangerang, dan Sentul. Akibatnya, Jakarta kehilangan potensi pajak dari kegiatan yang dipindahkan itu.

Perpindahan ini, kata Faisal, karena DKI belum mempunyai tempat yang memadai untuk menggelar acara hiburan besar. "Djakarta Warehouse Project dipindahkan dari Kemayoran ke Bali. Potensi pajaknya sekitar Rp 6 miliar," ujarnya.

Sektor pajak lain yang menjadi sorotan adalah pajak penjualan bahan bakar minyak atau pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang ditargetkan sebesar Rp 1,275 triliun. Saat ini

realisasi mencapai Rp 1,15 triliun.

PBBKB DKI Jakarta dinilai seharusnya lebih tinggi dari perolehan saat ini. Untuk itu, kata Faisal, pihaknya tengah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk audiensi dengan PT Pertamina dalam rangka meningkatkan pajak. "KPK masuk untuk mendampingi optimalisasi perolehan pajak dengan mencegah tindakan korupsi di sini," kata Faisal.

Selama ini, DKI Jakarta belum bisa mengukur bahan bakar yang terjual di wilayah DKI karena belum mempunyai alat ukur. Ke depan, menurut Faisal, pihaknya berencana memasang alat tera RFID untuk mengukur bahan bakar yang terjual. (IRE)